

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Teori	15
2.1.1 Teori Sistem Hukum	16
2.1.1.1 Pembentukan Hukum Di Indonesia	16
2.1.1.2 Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	18
2.1.2 Teori Perbuatan Melawan Hukum	21
2.1.2.1 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	24
2.1.2.2 Pemulihan Kerugian	28
2.1.2.3 Pembuktian	29
2.2 Tinjauan Konseptual.....	31
2.2.1 Penyakit Menular Seksual.....	31
2.2.2 Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Jenis Data	43
3.3 Cara Perolehan Data	44
3.4 Jenis Pendekatan	46
3.5 Analisa Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian tentang Perlindungan Hukum dan Pemulihan Kerugian Terhadap Risiko Penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) dari Pasangan dalam Perkawinan	50
4.1.1 Peranan Hukum dalam Mengendalikan Penyebaran Penyakit Menular	50
4.1.2 Studi Komparasi PMS di Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina dan Indonesia.	55
4.1.2.1 Norma Pengaturan Penularan PMS di Singapura	56
4.1.2.2 Norma Pengaturan Penularan PMS di Brunei Darussalam.....	59
4.1.2.3 Norma Pengaturan Penularan PMS di Kamboja.....	63
4.1.2.4 Norma Pengaturan Penularan PMS di Filipina	66
4.1.3 Kasus Hukum Terkait Penularan Penyakit Menular Seksual di Indonesia.....	70
4.1.4 Studi Kasus dengan Implikasi Hukum dan Upaya Hukum Gugatan Penularan PMS dalam Perkara Perdata	74
4.2 Analisis Norma Pengaturan Penularan Penyakit Menular Seksual dari Pasangan dalam Perkawinan	78
4.2.1 Norma Pengaturan Pada Peraturan Perundang-Undangan.....	78
4.2.1.1 Ditinjau dari Peraturan-Undang di Bidang Kesehatan	78
4.2.1.2 Ditinjau dari Undang-Undang tentang Perkawinan	81
4.2.2 Norma Pengaturan Penanggulangan Penyakit Menular dan HIV-AIDS ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan	81
4.2.3 Norma Pengaturan Penanggulangan HIV-AIDS ditinjau dari Beberapa Peraturan Daerah	83
4.3 Analisis Perlindungan Hukum dan Pemulihan Kerugian Terhadap Risiko Penularan PMS dari Pasangan dalam Perkawinan	88

4.3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Penularan PMS dari Pasangan dalam Perkawinan.....88

4.3.2 Pemulihan Kerugian Penularan PMS dari Pasangan dalam Perkawinan96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN102

5.1 Kesimpulan.....102

5.2 Saran.....104



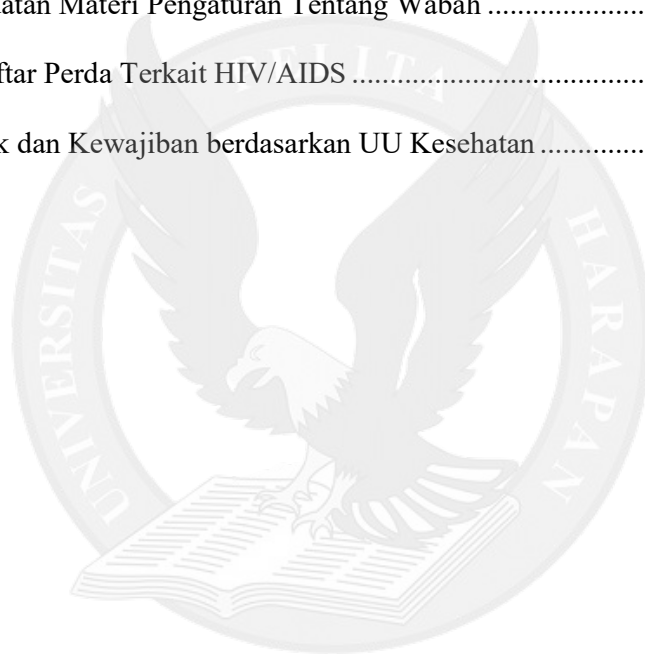
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Infeksi HIV Tertinggi Pada Kelompok Umur.....	6
Gambar 1.2 Jumlah Kasus PIMS Terbesar Berdasarkan Kelompok Individu.....	6
Gambar 4.1 Lini Waktu Sistem Hukum Kamboja.....	64
Gambar 4.2 Proporsi PMS dalam Putusan Pengadilan.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hirarki Perundang-undangan	18
Tabel 2. 2 Daftar Penyakit Menular Seksual	35
Tabel 4.1 Ringkasan Lingkup Pengaturan Pengendalian Penyakit Menular	54
Tabel 4.2 Putusan Pengadilan Terkait Penularan PMS.....	58
Tabel 4.3 Data IPR Kamboja Tahun 2000-2022.....	66
Tabel 4.4 Data IPR Filipina Tahun 2017-2022.....	68
Tabel 4.5 Muatan Materi Pengaturan Tentang Wabah	79
Tabel 4.6 Daftar Perda Terkait HIV/AIDS	84
Tabel 4.7 Hak dan Kewajiban berdasarkan UU Kesehatan	90



DAFTAR SINGKATAN

Act 11166	<i>Republic Act No. 11166 Philippine HIV and AIDS Policy</i>
Act 11332	<i>Republic Act No. 11332 Mandatory Reporting of Notifiable Disease and Health Events of Public Health Concern</i>
AIDS	<i>Acquired immunodeficiency syndrome</i>
BNPT	<i>Basic Psychological Needs Theory</i>
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CAP 204	<i>Infectious Diseases Act [CAP 204] 2010</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HBV	Virus Hepatitis B
HCV	Virus Hepatitis C
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HPV	<i>Human Papilloma Virus</i>
HSV	<i>Herpes Simplex Virus</i>
IDA	<i>The Infectious Disease Act 1976</i>
IPR	<i>Incidence Prevalence Ratio</i>
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LGV	<i>limfogranuloma venereum</i>
MDGs	<i>Millennium Development Goals</i>
MIB	Melayu Islam Beraja
NKRI	Negara Republik Indonesia
ODHA	Orang Denga HIV/AIDS
Perda	Peraturan Daerah
Permenkes	Peraturan Menteri Kesehatan
Permenkes 21/2013	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
Permenkes 23/2022	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome</i> , dan Infeksi Menular Seksual
Permenkes 82/2014	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular
PMS	Penyakit Menular Seksual
UNDAIS	<i>The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS</i>
UNTAC	<i>The United Nations Transitional Authority in Cambodia</i>
UU HIV/AIDS 2002	<i>The Law on the Prevention and Control of HIV/AIDS 2002</i>
UU KDRT	Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU Kependudukan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
UU Kesehatan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
UU Perkawinan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
	Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
UU WPM	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
WC 1961	<i>Women's Charter 1961</i>

